Ulin - J Hut Trop Vol 7 (2): 17-25
September 2023
pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI:http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302

Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan

Mohammad Toha[1], Ake Wihadanto[2], dan Nurhasanah[2]
[1]Program Studi Magister Lingkungan, Fakultas Saint dan Teknologi, UPPBJ Universitas Terbuka Tarakan, Jl. Mulawarman No.234, Karang Anyar, Kota Tarakan
[2]Program Studi Magister Lingkungan, Fakultas Saint dan Teknologi, Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan
E-Mail: 530058826@ecampus.ut.ac.id

Artikel diterima : 27 Febuari 2023. Revisi diterima 06 Juni 2023.

ABSTRACT

Many of the people who live around the forest area in Tarakan City who are included in the social forestry program live in poverty, even though in their neighborhood there are many forest resources that can be used to support their lives. It is necessary to identify the causal factors and strategies that must be implemented to improve their welfare. This study aims to analyze the impact of social forestry programs on community welfare and analyze priority strategies in social forestry programs. This research was conducted in a social forestry program implemented in Tarakan City, North Kalimantan Province. Measuring the level of welfare is analyzed by using BPS indicators and analysis of priority strategies was carried out using the SWOT and AHP methods. The results showed that the level of social welfare is 70.97% was in the not-prosperous category and 29.03% was in the prosperous category. The results of the AHP analysis show that the priority strategies that can be implemented are first, strengthening the institutional capacity of social forestry groups; second, compiling a business development program based on sustainability and; third, increasing the quantity and quality of human resources accompanying the social forestry group.

Key words: Social forestry, forest sustainability, community welfare and strategy.

ABSTRAK

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Kota Tarakan yang masuk dalam program perhutanan sosial banyak yang hidup miskin, padahal di lingkungan tempat tinggalnya banyak sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang hidup mereka. Hal ini perlu dilakukan identifikasi faktor penyebabnya dan strategi yang harus dilakukan guna meningkatkan kesejahteran mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dan menganalisis strategi prioritas pada program perhutanan sosial. Penelitian dilakukan pada program perhutanan sosial yang dilaksanakan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran tingkat kesejahteran dianalisis dengan menggunakan indikator BPS, analisis strategi priorotas dilakukan dengan metode SWOT, selain itu juga dilakukan analisis menggunakan AHP. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 70,97% masuk kategori belum sejahtera dan 29,03% masuk kategori sejahtera. Hasil analisis AHP diperoleh strategi prioritas yang dapat dilakukan: 1) penguatan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial; 2) menyusun program pengembangan usaha berasaskan kelestarian; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendamping kelompok perhutanan sosial.

Kata kunci: Perhutanan sosial, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat dan strategi.

PENDAHULUAN

Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, namun sayangnya mereka hidup dalam kondisi miskin dan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi mereka memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari (Dewi, 2018). Hal ini yang dapat memicu terjadi kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan memperbaiki kondisi sumber daya alam tempat masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya, maka perlu pendekatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat (Nurfatriani dkk., 2019). Melalui peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menambah kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan.

Program perhutanan sosial dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka. Program perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan. Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan memberikan peningkatan alokasi lahan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar (30%) untuk dapat dikelola oleh masyarakat.

Program perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Utara baru dimulai pada tahun 2018. Salah satu wilayah pelaksanaan program perhutanan sosial adalah di Kota Tarakan dengan luas 323 ha yang dikelola oleh 4 (empat) kelompok masyarakat. Berikut adalah kelompok masyarakat perhutanan sosial yang ada di Kota Tarakan.

Tabel 1. Kelompok masyarakat perhutanan sosial di wilayah Kota Tarakan

No	Nama Kelompok	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota
1	Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan	105	37
2	Gapoktanhut Gunung Slipi	105	31
3	KTH Slipi Makdekpon	86	26
4	KTH Taka Ngai	27	35

Pelaksanaan program perhutanan sosial yang dilaksanakan di wilayah Kota Tarakan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tersebut maka dapat meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan sebagai tempat mereka bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agusti dkk. (2019) mengemukakan bahwa tujuan jangka panjang dari program perhutanan sosial adalah untuk memulihkan hutan yang kritis, meningkatkan pelibatan masyarakat secara aktif yang berada di sekitar hutan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memberikan ketersediaan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan menganalisis strategi prioritas pelaksanaan program perhutanan sosial.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung Satu/SKIP Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang di dalamnya terdapat kawasan hutan lindung seluas 7.066 hektar yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.942/Menhut-II/2013, wilayah ini menjadi lokasi pengelolaan sumber daya hutan oleh kelompok perhutanan sosial.

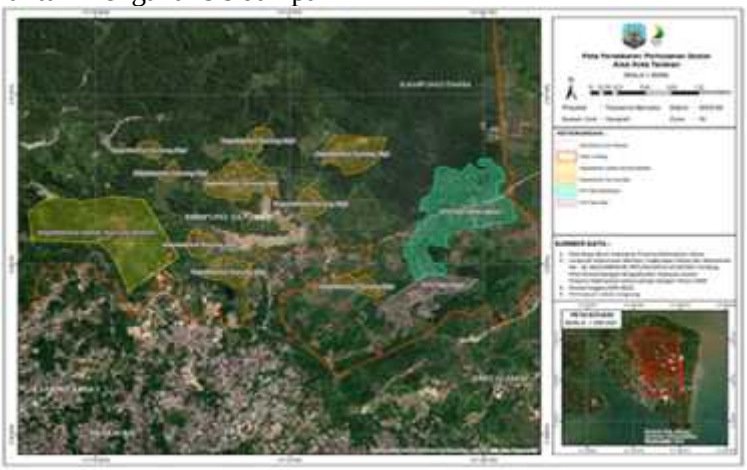

Gambar 1. Peta Penyebaran Kelompok Perhutanan Sosial di Kota Tarakan (UPTD KPH Kota Tarakan Tahun 2022)

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI:http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302

Prosedur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi atau fenomena dengan menggunakan data kuantitatif dan penjelasan kualitatif (Bungin, 2020). Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD) baik ke masyarakat maupun pegawai pada UPTD KPH Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai UPTD yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPTD KPH Tarakan, 2 orang Kepala Seksi, 6 orang Penyuluh Kehutanan, 2 orang Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha dan 1 orang Analis Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis Data

Metode Analisis Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat

Upaya untuk menganalisa tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari 7 inidikator (Rosni, 2017). Indikator pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Pengukuran indikator kesejahteraan

No.	Indikator Kesejahteraan	Nilai
1	Kependudukan	Nilai Maksimal 3
2	Kesehatan dan Gizi	Nilai Minimal 1
3	Pendidikan	
4	Ketenagakerjaan	
5	Taraf dan Pola Konsumsi	
6	Perumahan dan Lingkungan	
7	Sosial dan lain-lain	

Klasifikasi kesejahteraan dihitung menggunakan rumus berikut (Sari dkk., 2014).

$$RS = \frac{SkT - SkR}{JKI}$$

Keterangan:
RS = Range Skor
SkT = Skor tertinggi (7 x 3 = 21)
SkR = Skor terendah (7 x 1 = 7)
JKl = Jumlah klasifikasi yang dipakai (sejahtera dan belum sejahtera)

Populasi dalam penelitian ini seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang masuk dalam program perhutanan sosial di wilayah Kota Tarakan Kalimnatan Utara ada 129 orang. Sampel diambil melalui metode acak sederhana (simple random sampling). Jumlah sampel ada 56 orang yang ditentukan melalui rumus Slovin (Siregar, 2013) dengan margin *eror* sebesar 10%.

Metode Analisis Strategi Prioritas

Upaya untuk merumuskan strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam mendukung keberhasilan program perhutanan sosial adalah dengan menggunakan Analisis SWOT yang merupakan sebuah konsep dalam manajemen strategis, yang dapat dilakukan dengan menekankan pada penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta dengan melihat kecenderungan dari perubahan di masa yang akan datang sebelum menetapkan strategi yang akan dilakukan (Fatimah, 2020). Upaya untuk merumuskan strategi melalui analisis SWOT, maka perlu dilakukan identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Tabel 3. Tabel Analisis SWOT

Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (*Strength*)** **Faktor-faktor kekuatan internal**	**Kelemahan (*Weakness*)** **Faktor-faktor kelemahan internal**
Peluang (Opportunities) Faktor-faktor peluang eksternal	STRATEGI SO Menyusun strategi dengan cara memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Menyusun strategi dengan cara memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan
Ancaman (*Threats*) Faktor-faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Menyusun strategi dengan cara memaksimalkan kekuatan dan mengatasi ancaman	STRATEGI WO Menyusun strategi dengan cara meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman

Setelah rumusan strategi diperoleh dari hasil analisis SWOT, selanjutnya dilakukan penentuan strategi prioritas melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analytical Hierarchy Process AHP bersifat multi kriteria sehingga banyak digunakan dalam menyusun prioritas (Istianingsih dkk., 2019). Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan strategi prioritas dengan menggunakan AHP adalah:

a) Membuat diagram hirarki.
b) Menghitung penilaian kriteria dan alternatif strategi dengan perbandingan berpasangan.
c) Melakukan pengolahan data responden. Oleh karena responden lebih dari satu, maka digunakan rumus geometri seperti berikut ini.

$$X_G = \sqrt[n]{\prod \sum_{i=1}^{n} x_i}$$

XG = Rata rata geometri
N = Jumlah responden
∏ = Hampir sama dengan sigma
Xi = Penilaian oleh responden ke –i

d) Menghitung nilai Lamda Max.

$$\lambda \max = \frac{\sum a}{n}$$

∑ a = Jumlah nilai setiap kolom dari matriks
N = Jumlah kolom

e) Menghitung indeks konsistensi (CI).

$$CI = \frac{\sum \lambda \max - n}{n - 1}$$

∑ λ max = Jumlah lamda total
N = orde matriks

f) Menghitung rasio konsistensi (CR) agar dapat diketahui rasio konsistensi dapat diterima (konsisten) atau tidak.

$$CR = \frac{CI}{IR}$$

CI = Indeks Consistency
IR = Index Random Consistency

g) Menentukan strategi prioritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pendidkan Masyarakat

$$\lambda \max = \frac{\sum a}{n}$$

Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan seperti yang ada pada tabel berikut.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	%
1	Sekolah Dasar (SD)	33,87
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	30,65
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	33,87
4	Sarjana (S1)	1,61

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di wilayah perhutanan sosial umumnya (64,52%) berpendidikan SD dan SLTP, tingkat pendidikan yang rendah ini tentu dapat mempengaruhi perilakunya dalam mengelola hutan guna menunjang perekonomiannya.

Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Perhutanan Sosial

Hasil penelitian tingkat kesejahteraan masyarakat pada kelompok perhutanan sosial dengan 7 (tujuh) indikator kesejahteraan yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya, dapat dilihat pada Gambar 2.

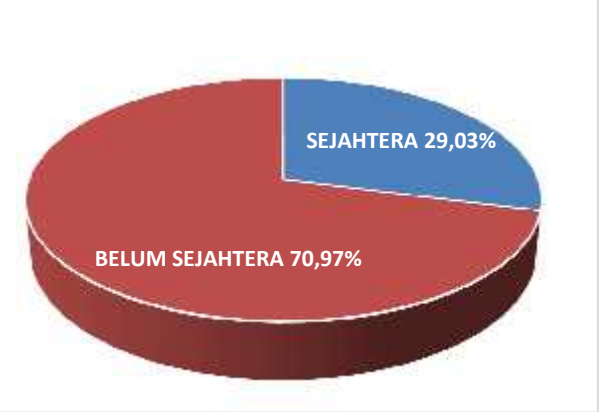

Gambar 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Gambar di atas menunjukan bahwa dari jumlah sampel 62 orang, sebanyak 44 orang atau 70,97% masuk kategori belum sejahtera dan 18 orang atau 29,03% masuk kategori sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perhutanan sosial masih kurang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat kelompok perhutanan sosial. Murti (2018) mengemukakan bahwa pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI:http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302

sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan program perhutanan sosial di wilayah Kota Tarakan masih belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor pertama adalah kualitas sumber daya manusia (masyarakat) yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 70% responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah (SD) sehingga sangat mempengaruhi dalam memahami pelaksanaan program perhutanan sosial tersebut. Suharti dkk., (2017) mengemukakan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan dan keterbatasan keterampilan yang tinggal di sebagian besar wilayah pengembangan perhutanan sosial akan menghadapi banyak kesulitan dalam mempersiapkan rencana kegiatan pengelolaan.

Faktor kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan yang ada. Kelompok perhutanan sosial di wilayah Kota Tarakan umumnya memiliki permasalahan pasca terbentuknya kelompok perhutanan sosial tersebut, karena mereka belum memiliki rencana usaha yang jelas dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga sangat sulit bagi mereka melakukan pengembangan usaha. Affandi dkk., (2019) mengemukakan bahwa sebagian besar pemegang izin skema Perhutanan Sosial cenderung kurang berkembang setelah mendapatkan izin Perhutanan Sosial sebagai akibat mereka masih belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan yang ada yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Faktor yang ketiga adalah kurangnya pendampingan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pendampingan terhadap masyarakat sekitar hutan umumnya dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan. Hujani dkk., (2019) menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan pendampingan ini diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan demi mencapai kesejahteraan hidupnya.

Hasil Analisis Strategi Prioritas Program Perhutanan Sosial

Dalam merumuskan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program perhutanan sosial, faktor-faktor tersebut adalah faktor internal berupa: kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan faktor eksternal berupa: peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Hasil identifikasil faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal

No.	Identifikasi Faktor Internal	No.	Identifikasi Faktor Eksternal
A	Kekuatan (*Strengt*)	C	Peluang (Opportunity)
	Ada dukungan anggaran dari pemerintah		Potensi sumber daya alam masih besar
	Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan		Pola pengelolaan yang beragam
	Legalitas kelompok perhutanan sosial		Kerja sama dengan kemitraan
	Pendampingan penyuluh pada masyarakat		Menciptakan peluang usaha
B	Kelemahan (*Weakness*)	D	Tantangan/Ancaman (*Threat*)
	Kuantitas dan kualitas SDM pendamping masih kurang		Pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal
	Rendahnya kualitas SDM masyarakat kelompok perhutanan sosial		Pembukaan lahan
	Perencanaan pengembangan usaha belum optimal		Kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya hutan
	Informasi pasar masih kurang terhadap hasil yang dikembangkan		Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal, kemudian dilakukan perumusan alternatif strategi yang diperoleh dengan mengkombinasikan masing-masing faktor internal dan faktor eksternal. Hasil dari perumusan strategi dengan menggunakan analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Rumusan alternatif strategi

No.	Alternatif Strategi	Kode
1	Pemberian bantuan hibah sarana dan prasarana ekonomi produktif	S-1
2	Memfasilitasi legalisasi izin perhutanan sosial	S-2
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendamping kelompok perhutanan sosial	S-3
4	Identifikasi potensi pemanfaatan sumber daya hutan	S-4
5	Peningkatan pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial	S-5
6	Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial	S-6
7	Pengembangan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya hutan	S-7
8	Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha	S-8
9	Menyusun program pengembangan usaha berasaskan kelestarian	S-9

Setelah mendapatkan alternatif strategi kemudian dilakukan penentuan strategi prioritas dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penentuan strategi prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek lingkungan merupakan aspek yang mempertimbangkan pemanfaatan hutan dengan mejaga kelestarian hutan untuk menjamin keberlanjutan hasil hutan, aspek ekonomi merupakan aspek yang dapat memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan aspek sosial merupakan aspek yang mempertimbangkan tingkat partisipasi masyakarakat sekitar hutan dalam melaksakan program perhutanan sosial sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut maka didapatkan diagram hirarki sebagai berikut.

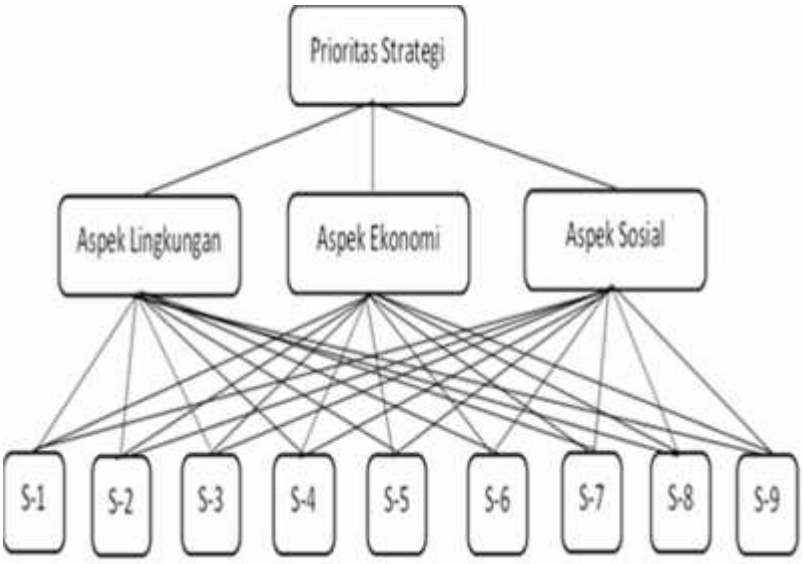

Gambar 3. Digram hirarki penentuan strategi prioritas.

Hasil dari perhitungan *Lamda max*, Indeks konsistensi (CI) dan Rasio konsistensi (IR) dari kriteria aspek dan antara kriteria aspek dan alternatif strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 7. Nilai lamda max dari kriteria aspek

Kriteria Aspek	*Vector Eigen*	*Lamda Max*
Aspek Lingkungan	0,67	0,99
Aspek Ekonomi	0,21	1,08

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI:http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302

Kriteria Aspek	*Vector Eigen*	*Lamda Max*
Aspek Sosial	0,12	0,95

Tabel 8. Nilai lamda max dari strategi berdasarkan aspek lingkungan

Aspek Lingkungan	*Vector Eigen*	*Lamda Max*
S-1	0,05	1,00
S-2	0,06	1,14
S-3	0,11	0,96
S-4	0,08	1,00
S-5	0,08	0,99
S-6	0,26	1,01
S-7	0,07	1,15
S-8	0,05	1,02
S-9	0,25	0,96

Tabel 9. Nilai lamda max dari strategi berdasarkan aspek ekonomi

Aspek Ekonomi	*Vector Eigen*	*Lamda Max*
S-1	0,17	1,00
S-2	0,05	1,02
S-3	0,11	1,08
S-4	0,06	1,00
S-5	0,15	1,00
S-6	0,17	1,01
S-7	0,06	1,00
S-8	0,06	1,07
S-9	0,17	1,01

Tabel 10. Nilai Lamda Max dari Strategi berdasarkan Aspek Sosial

Aspek Sosial	*Vector Eigen*	*Lamda Max*
S-1	0,06	1,00
S-2	0,08	1,14
S-3	0,24	0,96
S-4	0,06	1,00
S-5	0,06	0,99
S-6	0,23	1,01
S-7	0,14	1,15
S-8	0,07	1,02
S-9	0,07	0,96

Nilai rasio konsistensi masing-masing sebesar 0,2; 0,3; 0,2 dan 0,2 yang semuanya ≤ 0,1 menunjuukkan bahwa rasio konsistensi tersebut dapat diterima. Selanjutnya, nilai vector eigen dengan masing-masing kriteria aspek dan alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Strategi Prioritas

Strategi	Aspek Lingkungan	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial	Nilai	Rank
S-1	0,05	0,17	0,06	0,07	5
S-2	0,06	0,05	0,08	0,06	8

Strategi	Aspek Lingkungan	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial	Nilai	Rank
S-3	**0,11**	**0,11**	**0,24**	**0,12**	**3**
S-4	0,08	0,06	0,06	0,07	6
S-5	0,08	0,15	0,06	0,09	4
S-6	**0,26**	**0,17**	**0,23**	**0,24**	**1**
S-7	0,07	0,06	0,14	0,07	7
S-8	0,05	0,06	0,07	0,06	9
S-9	**0,25**	**0,17**	**0,07**	**0,21**	**2**

Tabel di atas menunjukkan ada 3 (tiga) besar strategi prioritas secara berurutan adalah sebagai berikut.

Strategi prioritas pertama berupa penguatan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan praktek pengelolaan hutan negara yang mempunyai karakteristik sebagai sumberdaya bersama dengan menggabungkan dua hal yaitu suatu jenis sumberdaya hutan dan suatu kelompok pengelola/kelompok masyarakat (Affandi, 2019). Kemampuan dari kelompok perhutanan sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari program perhutanan sosial yang dijalankan oleh kelompok tersebut. Rustandi dkk., (2020) mengemukakan bahwa kapasitas petani yang merupakan potensi yang dimiliki sebagai kemampuan petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat diabaikan jika ingin mencapai keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Pengembangan kelembagaan masyarakat kelompok perhutanan sosial bertujuan agar masyarakat mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan dengan memperhatikan kelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kelompok masyarakat tersebut (Rosmaladewi, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial penting dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program perhutanan sosial tersebut. Kirana dkk., (2022) mengemukakan bahwa salah satu solusi untuk meningkatkan peran kelompok tani hutan adalah melalui peningkatan kapasitas kelompok tani hutan tersebut. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perhutanan sosial dapat dilakukan baik pada tataran organisasi atau individu yang berhubungan dengan aspek manajemen maupun aspek pengetahuan teknis dalam pengelolaan usaha.

Strategi prioritas kedua adalah menyusun program pengembangan usaha berasaskan kelestarian. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial adalah pengelolaan sumber daya hutan pasca izin perhutanan sosial terbit. Hal ini terjadi karena belum jelasnya pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial tersebut. Oleh karena itu, perlu ada intervensi baik dari pemerintah maupun swasta untuk membantu masyarakat sekitar hutan yang akan mengajukan izin perhutanan sosial guna menyusun pengembangan usaha sumber daya hutan yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dengan tetap berazaskan pada kelestarian hutan.

Strategi prioritas ketiga adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pendamping kelompok perhutanan sosial. Pendampingan terhadap masyarakat kelompok perhutanan sosial dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat kelompok perhutanan sosial agar masyarakat dapat memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan. Ekawati (2020) mengemukakan bahwa melalui pendampingan terhadap suatu kelompok masyarakat di wilayah perhutanan sosial diharapkan kelompok masyarakat tersebut dapat berkembang dan mandiri dalam melakukan usaha pengelolaan sumber daya hutan. Guna mencapai hal ini, maka peran pendamping menjadi salah satu faktor yang menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan program perhutanan sosial tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi salah strategi yang penting agar pelaksanaan program perhutanan sosial dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan

pISSN 2599 1205, eISSN 2599 1183
DOI:http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302

DAFTAR PUSTAKA

Affandi O, Kartodihardjo H, Nugroho B & Ekawati. 2019. Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Inovasi, 16 (2): 139-162.

Agusti TM, Nurjaya IN & Imam KI. 2019. Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4 (2): 300-309.

Bungin B. 2020. Post-Qualitative Social Research Methods. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Kencana.

Dewi IN. 2018. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial. Info Teknis EBONI, 15 (2): 65 – 77.

Ekawati S, Suharti S & Anwar S. 2020. Bersama Membangun Perhutanan Sosial. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Bogor: IPB Press.

Hujani E, Bempah I & Saleh Y. 2019. Peran Penyuluhan Terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Agrunesia, 3 (3): 156 – 162.

Istianingsih N, Salim E & Defit S. 2019. Strategi Sustainability UMKM Pisang Sale di Kabupaten Bungo dengan Metode SWOT dan Analytic Hierarchy Process (AHP). Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS), 110 – 119.

Kirana MA, Latifah S dan Hidayati E. 2022. Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar, Lombok. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia, 1(1): 1-15.

Murti HA. 2018. Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat Dan Pengurangan Kemiskinan. Jurnal analis Kebijakan, 2(2): 62 – 75.

Nurfatrian F & Alviya I. 2019. Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha Untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 16 (1): 47-66.

Rosmaladewi O. 2022. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Melalui Eduforestry Sebagai Implementasi MBKM Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Gunung Puntang Kabupaten Bandung. Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, 2 (3): 313 – 320.

Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jurnal Geografi, 9 (1): 53 – 66.

Rustandi AA, Harniati, Kusnadi D. 2020. Strategi Peningkatan Kapasitas Petani Dalam

Komunitas Usaha Tani Jagung (Zea Mays L) Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(3):589 – 598.

Sari DK, Haryono D & Rosanti N. 2014. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 2 (1): 64 – 70.

Siregar S. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.

Suharti S, Ginoga KL, Murniati D. Octavia A. Windyoningrum. 2017. Langkah strategis menuju percepatan realisasi capaian program perhutanan sosial. Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim.